

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2007

SUARA MAHASISWA

PLTN, Batan, dan Masyarakat Muria

M LUBABUN NI'AM ASSHIBBAMAL S
Mahasiswa Jurusan Sosiologi, Fisipol,
UGM Yogyakarta

BADAN Tenaga Atom Nasional (Batan) kembali menabuh genderang megaprojek pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Semenanjung Muria, Jawa Tengah. Jika berjalan sesuai rencana, proyek tersebut tahun depan mulai dilelangkan ke beberapa negara peminat, seperti Jepang, Korea, Prancis, AS, dan Rusia. Selanjutnya pada 2016, minimal satu unit nuklir sudah dapat difungsikan dari empat unit yang direncanakan.

Namun, sebagaimana pertama kali dicetuskan mantan Menristek/Kepala BPPT BJ Habibie pada 31 Agustus 1996, tidak sedikit kalangan yang menentangnya. Mereka yang lantang bersuara antara lain sebagian kalangan ahli nuklir, ahli energi dan lingkungan, para akademisi, aktivis LSM, tidak ketinggalan pula mayoritas masyarakat Jawa Tengah.

Nah, mencuatnya respons negatif terhadap proyek pendirian PLTN tersebut sesungguhnya mengerucut pada satu muara persoalan, yaitu pemberdayaan masyarakat setempat. Artinya, sejauh ini aspek kepentingan masyarakat Muria kurang mendapat prioritas, terutama jika dihadapkan pada kemungkinan besar risiko sosial dan ekonomi yang bakal ditanggung.

Apalagi, belajar dari pengalaman proyek-proyek sejenis, semacam SUTET (saluran udara tegangan ekstratinggi), mereka yang menentang sebagian besar dari kalangan masyarakat bawah. Rata-rata mereka berpendidikan dan berpendapatan rendah, memiliki tanah yang tidak terlalu luas, serta mobilitas sosialnya terbatas. Sederet kelemahan tersebut berpaut dengan posisinya yang lemah dalam proses pengambilan putusan-putusan krusial. Dari sini dapat dipahami mengapa selama 11 tahun, suara masyarakat Muria tidak pernah sejurus dengan ambisi Batan.

Belum lagi belakangan makin sering mencuat persoalan mengenai biaya kesejahteraan sosial. Dengan nada lain, masyarakat Muria tentu tidak ingin, misalnya, kasus ganti rugi korban lumpur Lapindo yang berbelit, menimpa mereka. Begitu pun dengan konflik sengketa tanah Meruya Selatan (Jakarta) ataupun Alas Tlogo (Pasuruan) yang nyata menyisakan kekisruhan dan kerugian materiil.

Karena itu, sangat keliru apabila gelombang penentangan dari masyarakat Muria dinilai sebagai sikap "cari gara-gara". Atau, bahkan tidak mau menggubris duduk persoalannya. Justru munculnya aksi turun jalan serta slogan-slogan penentangan bukan berarti masyarakat Muria menolak upaya efisiensi pengelolaan listrik, melainkan itulah representasi lemahnya kebijakan pemerintah terhadap tawaran jaminan sosial.

Utamanya bersumber dari apakah standar keamanan lingkungan 100% terjamin, mengingat kebocoran unsur radioaktif dari nuklir bisa berimbas hingga ke kawasan Asia Tenggara dan Australia (studi Australian National University, 1996). Kalau memang tidak ada jaminan, tentu bakal menelan kerugian besar, baik materiil maupun imateriil, termasuk masalah relokasi permukiman, perubahan ketenagakerjaan yang mana PLTN Muria dipastikan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dengan beragam kualifikasi, serta dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang berkaitan. Itu jika Batan tidak sudi berpikir ulang. (*)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 12

TAHUN 2007

Belasan Ton Bahan Bakar Solar Dicuri dari Pipa PLN

[MEDAN] Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Medan masih melakukan pengejaran terhadap Adi Borok, otak pelaku pencurian belasan ton bahan bakar minyak solar milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Paya Pasir, Medan Labuhan, Sumatera Utara (Sumut).

"Kita masih sedang mengorek keterangan tiga tersangka rekan Adi Borok yang terlibat dalam pencurian bahan bakar, melalui pengeboran pipa yang disambungkan ke ke PLN," kata Kasat Reskrim Poltabes Medan, Kopol Budi Haryanto, Kamis (12/7).

Ketiga tersangka itu adalah Edi Suprianto (33) warga Komplek PLN, Lingkungan 33 Rengas Pulau Marelan dan Suhada (41) warga Lingkungan 53 Rengas Pulau. Keduanya satpam di kantor PLN. Sedang Dewi Murni (37) warga Lingkungan VII Simpang Kantor.

"Kalau Edi dan Suhada

mengaku hanya sebagai suruhan Adi Borok untuk menyedot minyak solar dari pipa. Penyedotan itu mereka lakukan setiap hari. Bila Adi Borok tertangkap, pendalaman penyelidikan diarahkan ke bagian PLN," ujarnya.

Upaya itu nantinya dilakukan polisi untuk memastikan lebih lanjut, apakah Adi Borok melakukan itu bekerja sama dengan pihak dalam. Cara kerja mereka dalam mencuri bahan bakar itu cukup profesional, juga menyambungkan pipa ke arah rumah Dewi, jelasnya.

Jadi, selain bahan bakar itu tersalur ke PLN, tapi juga mengalir melalui pipa ke rumah Dewi. Minyak solar itu kemudian dijual ke masyarakat, dibawa menggunakan mobil. Setiap hari, ribuan liter solar diperoleh komplotan Adi Borok ini.

Terungkapnya kasus ini atas adanya laporan

kasus pencurian solar dari pipa pertamina yang menghubungkan ke kantor PLN. Polisi kemudian membongkar kasus tersebut, mengamankan barang bukti berupa, 12 drum yang sebagian berisi solar.

Selain itu, polisi mengamankan selang sepanjang 200 meter, mesin pompa penghisap bahan bakar, mobil Kijang Inova BK 1803 MQ, hasil kejahatan dari kelompok ini. Mobil tersebut juga dioperasikan mengangkut solar untuk dijual ke luar Rengas Pulau.

Edi dan Suhada, saat diperiksa mengaku hanya sebagai suruhan Adi Borok. Mereka mengaku mendapatkan upah sebesar Rp 200.000 setiap hari, khusus untuk mengangkut dan menjual bahan bakar tersebut. Mereka mengaku tidak mengetahui, apakah Adi Borok bekerja sama melakukan kejahatan dengan orang dalam di PLN. [AHS/M-11]

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 22

TAHUN 2007

TENAGA LISTRIK

Indonesia Power Tambah 4.000 Megawatt

BANJARNEGARA, KOMPAS — Produksi energi listrik PT Indonesia Power yang kini 9.000 megawatt akan ditambah 4.000 MW lagi dalam empat tahun mendatang. Peningkatan itu akan didukung dengan menggerakkan pembangkit tenaga uap, bukan lagi tenaga air.

Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Indonesia Power Abimanyu Suyoso se usai meresmikan gedung pusat operasi PLTA unit Mrica di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Kamis (12/7).

Penambahan produksi itu, lanjut Abimanyu, akan dikembangkan di lima daerah di Jawa, antara lain Suralaya, Labuhan, Pelabuhan Ratu, dan Teluk Naga. "Di

kelima daerah, kami akan mengembangkan PLTU berbahan baku batu bara," jelasnya.

Batu bara dipilih karena ekonomis. Ongkos produksinya lebih murah dibandingkan bahan bakar minyak. Batu bara juga tak tergantung pada musim, seperti halnya PLTA yang sangat tergantung pada pasokan air.

Dengan penambahan tersebut, total produksi PT Indonesia Power menjadi 13.000 MW. "Sekarang kami memiliki jumlah produksi 9.000 MW dari sejumlah PLTA di Pulau Jawa," ujar Abimanyu menjelaskan.

General Manager PT Indonesia Power Teguh Adi Nuryanto mengemukakan, produksi sejumlah PLTA yang dioperasikan per-

usahaan tersebut, hingga saat ini, tidak menurun kendati musim kemarau telah menyebabkan volume air di sejumlah sungai di Jawa menyusut.

"Musim kemarau sekarang ini belum berpengaruh. Produksi masih tetap berjalan lancar. Produksi energi listrik hingga Desember mendatang masih penuh," tutur Adi.

Bahkan, lanjut dia, PT Indonesia Power telah membuat program pengendali operasi pada delapan sub-unit PLTA yang tersebar di Jawa Tengah (Jateng). Program pengendali tersebut dipusatkan di PT Indonesia Power unit Mrica, di Banjarnegara.

Beberapa sub-unit PLTA di Jateng bagian timur, lanjut Adi,

seperti di Wonogiri, Kedungombo, Jelok, dan Timo, akan dikendalikan secara terpadu bersama PLTA di Jateng bagian barat, seperti di Garung, Ketenger, Wadaslintang, dan PLTA Sudirman di Mrica. "Itu juga akan ditambah lagi dengan PLTMH (pembangkit listrik tenaga mikro hidro) di Sikeki, Plumbungan, dan Ketenger dengan total produksi mencapai 2,8 MW," kata Adi.

Dengan demikian, tambah dia tak diperlukan lagi banyak operator untuk mengoperasikan setiap PLTA. Sebaliknya, seluruhnya akan dikendalikan dari gedung pusat pengendali operasi PLTA unit Mrica. "Biaya operasi pun akan lebih efisien," uca Adi. (MDN)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2007



BANTUAN PLN – Dirut PLN Eddie Widiono disaksikan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dan Ketua Umum Dekopin Adi Sasono menyerahkan beasiswa kepada pelajar di Bali, Rabu (11/7). Selain beasiswa, PLN juga menyerahkan sumbangan tiga unit motor listrik untuk penggilingan padi milik KUD Karangasem.

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2007

RUU Energi Pro-Kepentingan Nasional

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi yang rencananya disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (17/7) mengutamakan sumber daya energi di Tanah Air untuk kepentingan nasional. RUU Energi juga mengatur insentif untuk pengembangan dan pemakaian energi terbarukan dan disinsentif energi tak terbarukan (fosil).

Ketika energi tak terbarukan telah habis, pendapatan dari energi tak terbarukan akan digunakan untuk membiayai pengembangan energi terbarukan. Dalam proses ini, harga energi juga akan ditetapkan dengan prinsip keberkeadilan dengan memperhatikan nilai keekonomiannya.

Demikian dikatakan Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) J Purwono dan anggota Komisi VII DPR Tjatur Sapto Eddy kepada *Investor Daily* di Jakarta, Kamis (12/7). Sebelumnya, dalam rapat dengan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Selasa (10/7), Komisi VII DPR menyepakati RUU Energi akan dibawa dalam rapat paripurna karena seluruh fraksi di DPR menyetujui RUU Energi.

Tjatur Sapto Eddy mengatakan, sumber energi yang masuk dalam RUU Energi adalah energi fosil minyak, gas, dan batubara, serta energi nonfosil, seperti air, panas bumi, biofuel, tenaga surya, tenaga angin, *fuel cell*, dan *biomassa*. "Sumber energi diutamakan untuk ketahanan energi nasional di dalam negeri terlebih dahulu sebelum diekspor keluar.

Dia menegaskan, pemerintah bisa memberikan kemudahan atau insentif kepada badan usaha maupun perseorangan, yang

mampu menyediakan maupun memanfaatkan energi dari sumber energi terbarukan. Pembangunan kit listrik yang memakai tenaga surya, angin, dan nuklir pantas mendapat anggaran untuk pengembangannya.

"Insentif yang akan diberikan bisa berupa kelonggaran fiskal dan non-fiskal. Namun untuk besaran angkanya nanti baru akan dibahas setelah pembentukan Dewan Energi Nasional (DENRED) pada enam bulan mendatang, usai pengesahan UU Energi," kata Tjatur.

Terkait insentif pemanfaatan sumber energi terbarukan, Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi J Purwono mengatakan masalah itu akan dirumuskan antardepartemen.

Menurut Purwono, UU Energi nantinya memperkuat landasan hukum bagi pemerintah untuk menjalankan program diversifikasi dan konservasi energi "Kalau tadinya hanya kebijakan-kebijakan pemerintah, saat ini akan ada UU yang juga berlaku bagi pemerintah, pelaku industri dan masyarakat," katanya.

Purwono menjelaskan, pemerintah sudah memiliki lima draft peraturan pemerintah (PP), yang akan dibuat paling lambat satu tahun sejak UU Energi disahkan. "PP itu di antaranya tentang pem-

Poin-poin Penting RUU Energi

- RUU Energi disahkan menjadi UU 17 Juli 2007
- UU Energi menjadi payung UU sektor Minerba, Migas, Panas Bumi, Pengelolaan Sumber Daya Air, dan UU Ketenagalistrikan
- Diversifikasi dan pemanfaatan energi baru terbarukan (geothermal, air, angin, dan surya)
- Disinsentif pemakaian energi tidak terbarukan (minyak, gas, batu bara)
- Insentif bagi pemakai dan produsen energi baru terbarukan
- Menjamin ketahanan energi, pasokan energi, dan partisipasi publik dalam kebijakan energi nasional
- Harga energi berdasarkan nilai keekonomian yang berkeadilan
- Pembentukan Dewan Energi dipimpin Presiden dan Wakil Presiden



berian insentif dan disinsentif pemakaian energi," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia (APBI) Jeffrey Mulyono menyambut positif rencana pengesahan RUU Energi menjadi UU. "Di negara mana pun mesti ada payung hukum yang menyangkut energi. UU Energi akan menggerakkan perekonomian nasional, karena ada jaminan ketersediaan energi," katanya.

APBI, lanjut Jeffrey, memberi masukan amerti RUU Energi, terutama menyangkut pengelolaan batubara di masa mendatang. APBI juga menyarankan agar Indonesia memiliki keamanan energi (*energy security*) dan penyediaan energi yang kompetitif. Pasalnya, pada 2025, batubara akan menjadi sumber daya energi primer menggantikan minyak dan gas bumi. "Batubara akan mengontribusi 33%, sisanya energi lain," tuturnya.

Payung UU Lainnya

Tjatur Sapto Eddy melanjutkan, UU Energi akan menjadi payung hukum dan acuan untuk UU energi lainnya, seperti UU Migas, UU Panas Bumi, UU Pe-

ngelolaan Sumber Daya Air, RUU Mineral dan Batubara, dan RUU Ketenagalistrikan. "Selain itu, RUU Energi mengharuskan adanya pencadangan (konservasi, **red**) energi, karena selama ini kita tidak pernah mengetahui berapa besar potensi energi fosil dan terbarukan yang dimiliki di Indonesia," katanya.

Setelah UU Energi disahkan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu membuat aturan rencana energi nasional. Pera-

turan yang dibuat dari kebijakan pemerintah pusat dan daerah harus saling mendukung.

Dewan Energi Nasional (DEN) yang dipimpin Presiden akan merumuskan kebijakan energi nasional secara komprehensif dan membuat *blue print* energi nasional ke depan. Anggota DEN terdiri 15 anggota, yang terdiri atas pemerintah tujuh orang dan delapan orang dari nonpemerintah yang dipilih oleh DPR.

Menurut dia, pemerintah pusat juga harus memperhatikan daerah yang menjadi lumbung energi, seperti Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. "Jangan sampai seperti saat ini, mereka sebagai lumbung energi, tapi malah mengalami krisis energi," tambah Tjatur.

Setiap daerah harus berusaha memenuhi dan mengembangkan potensi energi baru di setiap wilayahnya. Jika di daerah tersebut memiliki potensi energi terbarukan yang besar, daerah tersebut perlu menggunakan energi terbarukan dan mengurangi konsumsi energi fosil. (**pya/jad/lim**)

Potensi Energi Nasional

Energi Fosil	Sumber Daya	Cadangan (Proven + Possible)	Produksi (per Tahun)	Cadangan Tanpa Eksplorasi
Minyak	86,9 miliar barel	9 miliar barel	500 juta barel	18 Juta Barel
Gas	384,7 TSCF	182 TSCF	3,0 TSCF	61 TCF
Batubara	57 miliar ton	19,3 miliar ton	130 juta ton	-

Energi Non-Fosil	Sumber Daya	Setara	Pemanfaatan	Kapasitas Terpasang
Tenaga Air	845,00 juta BOE	75,67 GW	6.851,00 GWh	4.200,00 MW
Panas Bumi	219,00 juta BOE	27,00 GW	2.593,50 GWh	800,00 MW
Mini/Microhydro	458,75 MW	458,75 MW	84,00 MW	-
Biomass	49,81 GW	302,40 MW	-	-
Tenaga Surya	4,80 kWh/m2/hari	8,00 MW	-	-
Tenaga Angin	9,29 GW	0,50 MW	-	-
Uranium (Nuklir)	24,112 Ton eq 3 GW utk 11 tahun	-	-	-

Sumber : Blue Print Energi Nasional DESDM

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2007

Tingkatkan Rasio Elektrifikasi, Pemda Juga Berperan

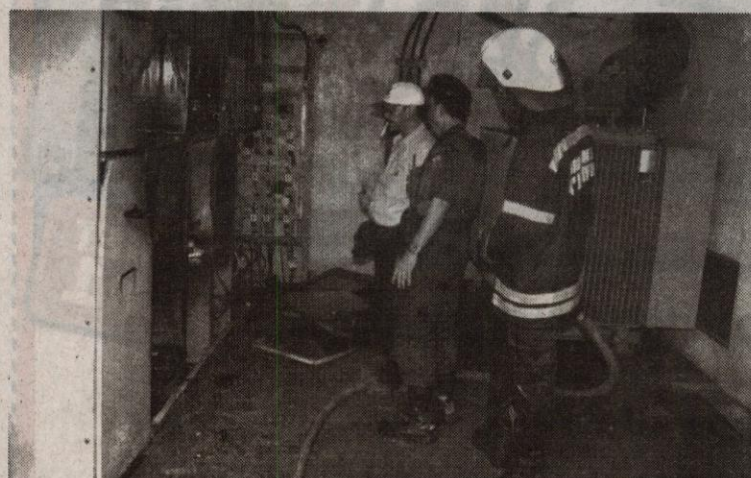
Rasio elektrifikasi, yaitu perbandingan jumlah rumah tangga yang sudah menikmati dan yang belum memperoleh pasokan listrik, memang masih belum memuaskan. Dari sekitar 59,51 juta rumah tangga di Indonesia, tercatat 32,17 juta rumah tangga yang menikmati listrik.

Data PT PLN (Persero) menunjukkan, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Banten, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan provinsi dengan persentase rasio elektrifikasi terendah di Tanah Air. Rasio elektrifikasi NTT tercatat 22,32%, Banten sekitar 22,98%, sedangkan di NTB 24,4%.

Dibanding tiga provinsi tersebut, rasio elektrifikasi di Sumatera Barat (Sumbar) relatif lebih baik. *General Manager* PLN Wilayah Sumbar Sudirman mengatakan, rasio elektrifikasi di daerah tersebut mencapai 56,76%. Jumlah tersebut juga relatif lebih tinggi daripada rasio elektrifikasi nasional.

Kendati begitu, tak seluruh daerah di wilayah pelayanan PLN Sumbar rasio elektrifikasinya tinggi. Tiga daerah, misalnya, yaitu Mentawai, Pasaman, dan Pasaman Barat, rasio elektrifikasinya masih kecil. "Ketiga daerah tersebut memiliki rasio elektrifikasi masing-masing 18,72%, Pasaman 37,37% dan Pasaman Barat 35,75%," ujar Sudirman kepada *Investor Daily*, baru-baru ini.

Jika dilihat dari desa yang sudah terlistriki, jumlahnya lumayan tinggi, menurut Sudirman, rasio elektrifikasi PLN Sumbar termasuk tinggi, yaitu 89,38%. Sementara itu, jumlah kepala keluarga (KK) yang



Karyawan PLN memperbaiki Gardu Induk yang terbakar di Pedurenan, Jakarta.

belum terlistriki mencapai 357.328 KK. Artinya, untuk mencapai rasio elektrifikasi 100% pada tahun 2020 yang menjadi target manajemen PLN, Sudirman mengaku pihaknya harus memasang sambungan baru rata-rata 27.500 KK per tahun. Sedangkan untuk desa sebanyak 17 desa baru per tahun.

"Target tersebut tidak terlalu muluk. Sebab, untuk 2002-2006 saja telah terealisasi 23.635 pelanggan per tahun, sementara itu 2007 ini targetnya adalah 32.200 sambungan pelanggan baru," jelas dia.

Kendati mengalami defisit operasional yang cukup besar setiap tahun, PLN Sumbar berkomitmen untuk melayani kebutuhan listrik masyarakat di wilayah tersebut.

Menurut Sudirman, listrik telah menjadi tolok ukur kemakmuran rakyat. Karena itu dengan berbagai tantangan yang ada, Sudirman bertekad merapatkan barisan untuk menyukseskan program Visi 75/100 yang dicanangkan Direktur Utama

PLN Eddie Widiono. Dalam Visi tersebut jajaran PT PLN bertekad agar pada saat ulang tahun ke-75 RI pada 2020, rakyat Indonesia 100% dapat mengakses aliran listrik.

Pemda Dukung

Sudirman menyadari kerja besar itu tidak bisa sepenuhnya hanya dipikul PLN sendiri. Komitmen dan kerja sama dari pemerintah daerah (pemda) untuk mewujudkan semua niat luhur itu sangat dibutuhkan. "Karena itu kami meng-empowering pemda-pemda untuk sama-sama membangun," tegasnya.

Sejauh ini sambutan pemda di daerah kerja PLN Wilayah Sumbar cukup baik. Contohnya, Pemkab Pesisir Selatan menyediakan dana sebesar Rp 800 juta untuk membangun jaringan listrik tegangan menengah dan jaringan rendah, termasuk pembangunan trafo. Dengan dana tersebut sejumlah warga mulai dapat menikmati

aliran listrik. Komitmen yang sama juga ditunjukkan Pemkab Tanah Datar yang menyediakan dana Rp 800 juta.

Berbeda dengan Tanah Datar, Pemkab Sawah Lunto membagikan *genset* kepada sejumlah daerah di wilayahnya yang belum terjangkau jaringan listrik PLN. *Genset* tersebut dioperasikan warga setempat atau koperasi. Namun karena pemeliharannya kurang baik, *genset* tersebut rusak.

"Yang menarik, komitmen ini tak semata dilakukan pemda di Sumbar. Salah satu pemkab di Jambi ikut memiliki *sense of responsibility* terhadap rakyatnya," ujar Sudirman. Salah satu pemda di Jambi yang mendukung Visi 75/100 PLN adalah Pemkab Kerinci.

Bupati Kerinci Fauzi Si'in menganggarkan dana sedikitnya Rp 600 juta untuk penyediaan listrik bagi rakyat di wilayahnya. Dia optimistis, dalam tempo maksimum empat tahun seluruh rakyat Kerinci dapat memperoleh suplai listrik. "Bahkan suplai

listrik dari kerinci sudah berlebih dan dapat dikirim ke wilayah lain di Indonesia," ujar Fauzi Si'in.

Wajar jika Fauzi menebar optimisme semacam itu. Saat ini di Merangin, Muara Imat, Kerinci, dibangun Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) Tirta Energi dengan kapasitas 20 x 90 MW. Pembangunannya diharapkan selesai 2010. Bersamaan dengan itu jaringan interkoneksi dari Bangko ke Sungai Penuh juga sedang dibangun.

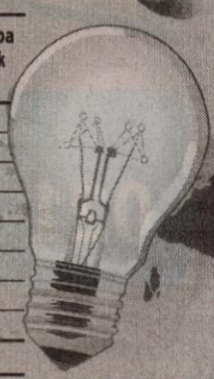
Bukan hanya masalah pemadaman yang dapat diatasi jika PLTA tersebut mulai berfungsi. Industri di kawasan Kerinci dan wilayah sekitarnya juga akan dapat dipacu. "Sebab listrik adalah tenaga penggerak industri. Kebutuhan listrik adalah cermin wilayah yang maju," ujar Fauzi.

Jika semua pemimpin daerah memiliki kepekaan seperti pemda di wilayah PLN Sumbar, sejatinya tak perlu menunggu hingga 2020. Dalam tempo cepat, 220 juta lebih rakyat Indonesia dapat menikmati aliran listrik. Ya, siapa tahu. (dr)

Rasio Elektrifikasi Pulau-Pulau di Indonesia

Pulau	Populasi (Juta Jiwa)	Rasio Elektrifikasi (%)	Populasi tanpa Akses Listrik (Juta Jiwa)
Jawa	127	72	35,6
Bali	3,4	83	0,6
Sumatera	44,6	55	19,9
Kalimantan	11,7	57	5,1
Sulawesi	15,3	61	6
Nusa Tenggara	8,1	34	5,4
Maluku	2,1	50	1,1
Papua	2,3	21	1,8
Total	214,5	Rata-rata: 65	75,4

Sumber: Bank Dunia



6

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 12

TAHUN 2007

Posko Pemboikotan Pembayaran Rekening Listrik Bermunculan di Medan

[MEDAN] Krisis listrik yang berkepanjangan di Medan Sumatera Utara (Sumut) berbuntut panjang. Kalangan ibu yang merasa diredakan, dirugikan atas pemadaman oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), akhirnya bertekad memboikot pembayaran iuran rekening listrik.

Pantauan SP, posko pemboikotan tersebut terdapat di Jl Karantina Gang Silaturahim No 10 A, Jl Bhayangkara No 391 N dan Jl Amir Hamzah No 18 Medan. Posko pemboikotan dibuat oleh Aliansi Sumatera Utara menggugat.

Direktur Lembaga Advokasi Pelayanan Konsumen (LAPK) Farid Wadji mengungkapkan hal tersebut kepada SP di Medan, Sumut, Rabu (11/7). Posko dibuka sesuai dengan permintaan

masyarakat ke LAPK.

Farid mengatakan, sudah sebelas warga Kota Medan menyatakan pemboikotan pembayaran iuran rekening listrik. Masih banyak warga yang akan melakukan pemboikotan tersebut.

"Tujuan pemboikotan ini bukan untuk membangkrutkan PLN. Sasaran utamanya untuk menggugah perhatian pemerintah atas PLN. Masyarakat mengharapkan pemerintah mempunyai hati nurani, tidak hanya berdiam diri atas PLN," ujarnya.

Farid menganggap kinerja PLN sangat tidak benar, apalagi dari waktu ke waktu hanya menyampaikan perbaikan mesin maupun kerusakan. Namun, solusi untuk mencari jalan keluar agar masyarakat tidak

menjadi korban tak dilakukan pejabat PLN.

"Memang kinerja pejabat PLN sudah tidak benar lagi. Wajar bila masyarakat yang memboikot pembayaran rekening listrik, tidak puas atas PLN. Audit memang sudah sepantasnya dilakukan. Pemerintah pun jangan diam saja," katanya.

Farid menyebutkan, pihaknya sudah sering kali menggugat PLN atas kebobrokan kinerjanya. Namun gugatan itu selalu dikandaskan, saat disidangkan di Pengadilan Negeri Medan.

Saat ini, LAPK kembali menggugat PLN. "Kami tidak akan pernah menyerah, kekalahan dari setiap gugatan akan membuat kami untuk terus berjuang, membela masyarakat untuk melawan PLN," ujarnya. [AHS/W-8]

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 13

TAHUN 2007

Sanksi bagi Pemakai Energi tidak Terbarukan

JAKARTA (Media): Pemerintah akan menetapkan sanksi dan beban pajak yang besar bagi industri yang tidak menggunakan energi tidak terbarukan.

Sebaliknya, insentif akan diberikan kepada pemakai dan produsen yang menggunakan energi terbarukan. Insentif yang akan diberikan bisa berupa kelonggaran fiskal dan nonfiskal.

Ketua Komisi VII Agusman Efendi menyatakan hal itu di sela acara raker di Jakarta Rabu (11/7) malam. "Dua klausul itu tercantum dalam salah satu pasal RUU Energi yang baru dirampungkan di tingkat pertama (Komisi VII).

Kebijakan-kebijakan dalam RUU itu, menurut Agus, sangat kuantitatif menyoal energi terbarukan dan tidak terbarukan. Yang termasuk energi terbarukan adalah geotermal (panas bumi), air, surya, dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk energi tidak terbarukan antara lain minyak bumi dan batu bara.

Secara umum, urai Agusman, di dalam RUU Energi diamanatkan tentang penyusunan rencana umum energi nasional, sebagai rujukan bagi kebijakan energi secara menyeluruh. "Kita tahu energi pada hari-hari ini menjadi pembicaraan dalam masyarakat, rumah

tangga, dan semua sektor kehidupan. Kami berharap, dengan adanya RUU Energi itu, pengelolaan energi di Indonesia sudah lebih baik." kata Agus.

Selain menjadi payung untuk sejumlah undang-undang terkait, menurut Agusman, RUU itu diharapkan bisa menjadi arahan dalam

'Sesuai RUU itu, dalam enam bulan Dewan Energi harus terbentuk setelah disahkan.'

mengatasi krisis energi yang dialami Indonesia.

Naskah RUU itu ditandatangani oleh seluruh fraksi di DPR dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro sebagai wakil pemerintah, Selasa (10/7) di Komisi VII DPR RI.

RUU itu baru akan ditetapkan

setelah mendapat pengesahan dalam sidang paripurna pada 17 Juli mendatang. Bila nantinya disetujui, inilah kali pertama, Indonesia memiliki UU Energi sejak merdeka.

Sehingga, RUU itu diharapkan bisa menjadi payung atas UU terkait yang sudah lebih dulu berlaku maupun sedang dalam pembahasan. Undang-undang itu adalah UU Migas, UU Panas Bumi, UU Pengelolaan Sumber Daya Air, RUU Mineral dan Batu Bara, serta RUU Ketenagalistrikan. Dua RUU itu sekarang dalam proses pembahasan.

Tiga jaminan

Secara garis besar, Agusman menguraikan, RUU Energi diharapkan dapat memberi jaminan atas tiga hal mendasar. Yaitu, jaminan pemerintah atas ketahanan energi, jaminan pemerintah atas pasokan energi, dan jaminan atas keterlibatan publik dalam merumuskan kebijakan energi nasional.

Pasal-pasal penting yang ada dalam RUU Energi antara lain mencakup tercapainya kemandirian pengelolaan energi, tersedianya sumber energi dari dalam negeri untuk pemenuhan energi dalam negeri, pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dalam negeri, maupun peningkatan devisa negara.

RUU Energi, menurut Agusman,

juga mengamankan harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian yang berkeadilan. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu. Selain itu, pemerintah wajib melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kondisi krisis maupun darurat energi.

Agusman menjelaskan, mengacu pada RUU itu, pemerintah akan membentuk Dewan Energi Nasional (DEN) yang akan merancang, menetapkan, dan mengawasi kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.

Berdasarkan keterangan Agusman, DEN harus dibentuk enam bulan setelah UU Energi disahkan. "Sesuai RUU itu, dalam enam bulan Dewan Energi terbentuk setelah disahkan," ujarnya.

DEN dibentuk untuk menggantikan Badan Koordinasi Energi (Bakoren). Bedanya, Bakoren diketuai Menteri ESDM, sedangkan DEN akan langsung berada di bawah presiden. Kebijakan Energi Nasional kemudian diimplementasikan di daerah. Karena itu, pemda harus menyusun perda soal rencana umum energi daerah. Daerah penghasil energi akan mendapat prioritas untuk mendapat energi dari sumber setempat. (Eva/E-3)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 9

TAHUN 2007



BEASISWA :
Dirut PT PLN
(Persero) Eddie
Widiono menyerah-
ahkan beasiswa
secara simbolis yang
disaksikan oleh
Menteri Energi dan
Sumber Daya
Mineral (ESDM)
Purnomo Yusgianto-
ro dan Ketua Umum
Dewan Koperasi
Indonesia Adi
Sasono, kepada 20
(dua puluh) orang
pelajar SMA Negeri I
dan SMA Negeri II
Karangasem
(Rabu, 11/7).

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 10

TAHUN 2007

Atasi Krisis Listrik, DPRD Sumut Surati Menteri

MEDAN — Menyikapi krisis listrik yang berkepanjangan, Ketua DPRD Sumatra Utara (Sumut) melayangkan surat resmi ke Meneg BUMN dan Menteri Pertambangan dan Energi (Mentamben) di Jakarta. Surat DPRD Sumut No 3985/18/Sekr tertanggal 10 Juli 2007 itu, meminta agar pemerintah pusat melalui kedua menteri tersebut segera memberikan solusi terbaik mengatasi krisis listrik di Sumut. Sementara itu PT Inalum telah memberikan komitmen untuk menyalurkan daya sebesar 90 MW.

Ketua DPRD Sumut, A Wahab Dalimunthe, mengatakan lahirnya surat untuk kedua menteri itu melalui keputusan rapat pimpinan dewan dan pimpinan fraksi yang digelar pada Selasa (10/7). Rapat itu dilakukan setelah melihat kenyataan krisis listrik di Sumut sudah pada tingkat meresahkan masyarakat. Apalagi pemadaman yang terjadi pada bulan terakhir yang terjadi secara berkepanjangan.

"Hasil rapat pimpinan dewan dan pimpinan fraksi, disepakati agar DPRD Sumut secara kelembagaan menyurati pemerintah pusat melalui menteri terkait," ujar Wahab, di Medan, Kamis (12/7).

Menurut Wahab, pemadaman listrik di Sumut telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Akibat pemadaman listrik yang tak menentu itu, mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat Sumut kepada pemerintah. Khususnya PT PLN (Perseero) Sumut.

Dampak lainnya, lanjut Wahab, krisis listrik yang

berkepanjangan akan berakibat buruk terhadap dunia usaha dan lambanya pergerakan ekonomi. "Berdasarkan pertimbangan itu, DPRD Sumut melayangkan surat ke pemerintah pusat, agar krisis energi listrik di Sumut segera diakhiri dengan mencari solusi mempercepat pembangunan pembangkit listrik di Sumut," kata Wahab.

Sementara itu, Kabid Humas Pemprov Sumut, ML Tobing, mengatakan pihaknya sudah mendapat konfirmasi dari PT Inalum dalam hal penyaluran energi listrik sebesar 90 MW kepada Sumut. "Komitmen itu diperoleh setelah Gubernur Rudolf Pardede membicarakan soal krisis listrik ini dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla," tegasnya.

Pihak Pemprov berharap komitmen itu akan segera diwujudkan secepatnya. Sebab, krisis listrik yang berujung terjadinya pemadaman bergilir, telah menimbulkan berbagai dampak bagi kehidupan masyarakat. "Dalam bulan ini diharapkan penyaluran energi dari PT Inalum sudah ada," kata Tobing.

Sebagaimana dinyatakan PLN, krisis listrik di Sumut itu baru akan kembali normal pada 2008 mendatang. Sedangkan pemadaman bergilir sampai 8 jam perhari, diperkirakan akan berlangsung sampai Agustus 2007. ■ nin

Fakta Angka

8 Jam

Lama waktu pemadaman listrik bergilir di Sumut.

HUBUNGAN MASYAKAKAI
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2007

Nuclear power: Is it friend or foe?

Sascha Pries
Jakarta

Blackouts in several parts of Java and Bali over the past month — caused by a shortage of fuel and technical problems — have put the use of nuclear power to supply Java with electricity back on the government's agenda.

The government has a long-term plan to use nuclear energy, and has even decided its site: Mount Muria, in Central Java. The 1997 economic crisis, however, forced the government to forget, at least for a while, its plans for a nuclear power plant. But the government has recently resumed the plan, which has triggered much controversy.

Fast growth of the economy has enabled more and more people to buy electrical devices and the industrial sector needs a more secure power supply. Something must be done to secure a reliable power supply.

The big question is: Would a nuclear power supply solve these problems, or would it do more harm than good?

The growth of the economy has not only affected power networks, but has had a big influence on greenhouse gas emissions, too.

As the fourth most populated country in the world, Indonesia, just like China and India, needs to take a major role in tackling climate change.

Nuclear power, as a presumed "clean" source of energy, seems like a decent solution to reduce the amount of CO emissions.

But as many critics have pointed out, there are several reasons why the use of nuclear power in Indonesia bears many risks.

Recent years have shown that Indonesia, and especially Java, is far from being a safe location for a nuclear power plant. Numerous volcanic eruptions, earthquakes, floods and tsunamis have caused damage to infrastructure and have claimed many lives.

Indonesia is home to some of the most active volcanoes on the planet. Although to be fair, Japan also has similar natural problems and their use of nuclear energy is quite intensive.

Several academics have raised concerns that ongoing corruption in the construction business also poses a high degree of danger (for the safe construction of a nuclear plant). For example, the use of low-quality materials by contractors to save money has

been a problem in the construction of the TransJakarta Busway.

Risking a second Chernobyl does not quite embrace the right dimensions in this case. The city of Chernobyl, at the time of the nuclear power plant disaster, was inhabited by around 14,000 people. Jepara alone has a population of 67,000, Kudus has 95,000 and Semarang about one million.

With the dangers at hand, it seems quite irresponsible to build a nuclear plant on one of the most densely populated places on earth.

But nuclear power not only bears acute dangers. Although there are no CO emissions, of course there are byproducts that have to be taken care of.

Old fuel rods have to be recycled and atomic waste has to be disposed of in an isolated location.

What is more, recycling or storing rods implies that nuclear material has to be moved within, or even out of the country. Indonesia's rail and road systems, let alone ships or airplanes, are far from suitable to guarantee secure transport of this highly dangerous freight.

The crucial question is, whether Indonesia is willing to put its people at risk, by taking

the easy way out of the power supply issue.

In regard to security in general, one should take a closer look at the nuclear plants in England and Sweden. In 2006, there were several serious malfunctions, in which contaminated water leaked into the sea and reactors had to be turned off. On August 4, 2006, a reactor in Forsmark, Sweden, became out of control for 22 minutes and was close to meltdown.

There are still many developed countries, like the U.S. and France, whose energy supply is crucially based on nuclear power. But for over 20 years there has been a move away from nuclear power towards renewable energies, especially in Europe.

Referendums held in Austria (1978), Sweden (1980) and Italy (1987) proscribed the building of new plants and, in a slow and ongoing process, aimed to ban nuclear power from these countries. Other countries, such as Ireland, did not even allow nuclear power plants in their territory in the first place.

The last German government, which consisted of the Social Democrats and the Green Party, decided in 2000 (and implemented in 2002) that the last German nuclear

plant would be shut down in 2021.

Nuclear power in Indonesia does not yet have a crucial share, so the time to decide the direction for the future is now.

As many environmental groups have already pointed out, there are plenty of alternatives to use natural energies to produce electricity in Indonesia.

Due to deforestation and a lack of water, hydroplants, which offer a cheap and clean alternative to coal and nuclear plants, can not be used as effectively as before. But Indonesia's location in the tropics and the constant weather conditions are suitable for the installation of solar power plants.

Solar power plants not only supply clean energy, but can also be set up for smaller communities, who would then be independent from the marked prices for oil, coal or uranium.

As the world community is looking for ways to reduce greenhouse gas emissions, financial support from Western governments shouldn't be that hard to come by.

Saving Indonesia from the risk of a meltdown and tackling the dangers of a 21st century environmental crisis is not merely a decision between nuclear plant or blackout.

Just as in other parts of the world, people in Indonesia must be sensitized to the responsible use of electricity.

There are academics who have calculated that the waste of energy in Germany is responsible for the necessity of two nuclear plants there.

Taking responsibility for our planet and supplying a reliable source of energy to the people in Indonesia needs expertise, education, negotiation skills and above all, the international political will to make a change.

The writer is an undergraduate student of History & English at the University of Cologne and Political Science at the Rheinische Friedrich-Wilhelms, University of Bonn. He can be reached at sascha.pries@smail.uni-koeln.de.